



PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP
KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan arsip sebagai instrumen dalam pengelolaan arsip dinamis dalam mendukung tugas pokok dan fungsi dari organisasi Kementerian Hak Asasi Manusia, diperlukan klasifikasi arsip yang logis, faktual, berkelanjutan, sistematis, akomodatif, dan kronologis;
- b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur, organisasi, dan tata kerja Kementerian Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia, perlu mengatur klasifikasi arsip di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Hak Asasi Manusia;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 352);
6. Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 891);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA TENTANG KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip.
2. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
3. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan Arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia.
7. Wakil Menteri adalah Wakil Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia.

Pasal 2

Klasifikasi Arsip Kementerian merupakan acuan bagi unit kerja di Kementerian dalam pengelolaan arsip dinamis secara terintegrasi sejak penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan arsip.

Pasal 3

- (1) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Klasifikasi Arsip fasilitatif; dan
 - b. Klasifikasi Arsip substantif.
- (2) Klasifikasi Arsip fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. organisasi dan tata laksana;
 - c. kepegawaian;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. keuangan;
 - f. pengelolaan barang milik negara;
 - g. kehumasan;
 - h. perpustakaan;
 - i. kerja sama;
 - j. hukum;
 - k. kearsipan;
 - l. ketatausahaan;
 - m. rumah tangga;
 - n. pengawasan; dan
 - o. teknologi informasi
- (3) Klasifikasi Arsip substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. instrumen dan penguatan hak asasi manusia; dan
 - b. pelayanan dan kepatuhan hak asasi manusia;

Pasal 4

- (1) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kementerian menggunakan kode Klasifikasi Arsip dalam bentuk kombinasi huruf dan angka.
- (2) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanda pengenal urusan sesuai fungsi dan tugas unit kerja serta berfungsi sebagai dasar penomoran Naskah Dinas, pemeliharaan arsip aktif dan arsip inaktif, serta penyusutan arsip.

Pasal 5

Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2025

MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

⌚

NATALIUS PIGAI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ⌚

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

🔑

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ✂

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG KLASIFIKASI ARSIP
KEMENTERIAN HAK ASASI
MANUSIA

KLASIFIKASI ARSIP FASILITATIF

KODE KLASIFIKASI		JENIS ARSIP
PR		PERENCANAAN
PR.01		Program dan Anggaran
	01.01	Rencana Pembangunan dan Masterplan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan dan Masterplan
	01.02	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
	01.03	Rencana Strategis
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Rencana Strategis (Renstra), dimulai dari pengumpulan data, pengolahan sampai dengan penetapan
	01.04	Rencana Pembangunan Jangka Pendek
		Usulan perencanaan, Musyawarah perencanaan pembangunan nasional, Rapat Kerja Teknis, Penyusunan Rencana Kerja
	01.05	Trilateral <i>Meeting</i>
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Trilateral <i>Meeting</i>
	01.06	Rencana Kerja
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan rencana kerja
		Program Tahunan Unit Kerja
		Program Tahunan Kementerian
	01.07	Rencana Kerja dan Anggaran
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L), yang di dalamnya berisi pagu indikatif dan pagu definitif
PR.02		Evaluasi

	02.01	Unit Kerja
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi program dan kinerja pada kementerian dan unit utama
	02.02	Kantor Wilayah
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi program dan kinerja pada kantor wilayah
PR.03		Pelaporan
	03.01	Laporan Bulanan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan Bulanan
	03.02	Laporan Triwulan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan Triwulan
	03.03	Laporan Semester
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan semester
	03.04	Laporan Tahunan Unit Kerja
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan tahunan pada unit utama
	03.05	Laporan Tahunan Kantor Wilayah
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan tahunan pada kementerian dan unit utama
	03.06	Laporan Tahunan Kementerian
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan Tahunan Kementerian
	03.07	Insidentil
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan insidentil
	03.08	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Unit Kerja
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Lapora Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Unit Kerja
	03.09	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Wilayah
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Lapora Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Wilayah
	03.10	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian
PR.04		Rapat Kerja
	04.01	Dengan Presiden dan Lembaga Tinggi Negara (Presiden, DPR, K/L)

		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan bahan rapat kerja dengan Presiden, lembaga tinggi negara (Presiden, DPR, K/L)
	04.02	Tingkat Unit Utama (RAKERNIS)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan bahan rapat kerja tingkat unit utama
	04.03	Tingkat Kantor Wilayah
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan bahan rapat kerja tingkat kantor wilayah
OT		ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
OT.01		Struktur Organisasi
	01.01	Pembentukan Struktur Organisasi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembentukan struktur organisasi
	01.02	Pengubahan Struktur Organisasi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengubahan struktur organisasi
	01.03	Pembubaran Struktur Organisasi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembubaran struktur organisasi
	01.04	Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan organisasi dan tata kerja kementerian
	01.05	Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan organisasi dan tata kerja kantor wilayah
OT.02		Uraian Jabatan dan Tata Kerja
	02.01	Uraian , Analisis Beban Kerja, dan Formasi Jabatan Pimpinan Tinggi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Uraian, Analisis Beban Kerja, dan Formasi Jabatan Pimpinan Tinggi
	02.02	Uraian , Analisis Beban Kerja, dan Formasi Jabatan Administrasi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Uraian, Analisis Beban Kerja, dan Formasi Jabatan Administrasi
	02.03	Uraian , Analisis Beban Kerja, dan Formasi Jabatan Fungsional
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Uraian, Analisis Beban Kerja, dan Formasi Jabatan Fungsional
OT.03		Evaluasi Kelembagaan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi Kelembagaan

OT.04		Standar Kompetensi Jabatan
	04.01	Jabatan Pimpinan Tinggi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi
	04.02	Jabatan Administrasi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Standar Kompetensi Jabatan Administrasi
	04.03	Jabatan Fungsional
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional
OT.05		Ketatalaksanaan
	05.01	Standarisasi Sarana Kerja
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan standarisasi sarana kerja
	05.02	Sistem, Prosedur dan Metode Kerja
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), proses bisnis, mekanisme dan hubungan kerja
OT.06		Reformasi Birokrasi
	06.01	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
	06.02	Zona Integritas (ZI)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Zona Integritas (ZI)
	06.03	Perjanjian Kinerja
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perjanjian Kinerja
	06.04	Evaluasi Reformasi Birokrasi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi reformasi birokrasi
KP		KEPEGAWAIAN
KP.01		Formasi Pegawai
	01.01	Inventarisasi Jabatan/Peta Jabatan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Inventarisasi Jabatan/Peta Jabatan
	01.02	Usulan Formasi, Alokasi Formasi, Formasi Khusus
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Usulan Formasi, Alokasi Formasi, Formasi Khusus
	01.03	Evaluasi Formasi

		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Evaluasi Formasi
KP.02		Penerimaan/Pengadaan Pegawai/ Sumber Daya Manusia
	02.01	Proses Penerimaan Pegawai
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Proses Penerimaan Pegawai
	02.02	Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima
	02.03	Surat Keputusan CPNS/PNS Kolektif, PPPK
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat Keputusan CPNS/PNS Kolektif, PPPK
	02.04	usul nomor induk pegawai (NIP)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat Keputusan CPNS/PNS Kolektif, PPPK
KP.03		Pengangkatan Pegawai
	03.01	Orientasi CPNS
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Orientasi CPNS
	03.02	Pengangkatan PNS
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengangkatan PNS
	03.03	Pengangkatan Jabatan Struktural
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengangkatan Jabatan Struktural
	03.04	Pengangkatan Jabatan Fungsional
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengangkatan Jabatan Fungsional
	03.05	Pengangkatan PPPK
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengangkatan PPPK
KP.04		Mutasi Pegawai
	04.01	Alih Tugas/Diperbantukan/Dipekerjakan/ Pelaksana
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Alih Tugas/Diperbantukan/Dipekerjakan/ Pelaksana
	04.02	Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
	04.03	Kenaikan Pangkat/Golongan

		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kenaikan Pangkat/Golongan
	04.04	Mutasi Pegawai, Mutasi Pimpinan, Mutasi Unit Kerja, Mutasi antar instansi, Mutasi Keluarga
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Mutasi Pegawai, Mutasi Pimpinan, Mutasi Unit Kerja, Mutasi antar instansi, Mutasi Keluarga
KP.05		Pembinaan Karier
	05.01	Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP)
		- Sasaran Kerja Pegawai
		- Prestasi Kerja Pegawai
	05.02	Penilaian kinerja jabatan Fungsional
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penilaian kinerja jabatan Fungsional
	05.03	Pembinaan Disiplin dan Kode Etik
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pembinaan Disiplin dan Kode Etik
	05.04	Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah
	05.05	Pencantuman Gelar
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pencantuman Gelar
	05.06	Beasiswa
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Beasiswa
	05.07	Uji Kompetensi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Uji Kompetensi
	05.08	Pengelolaan Sistem Merit
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengelolaan Sistem Merit
	05.09	Pengelolaan Manajemen Talenta
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengelolaan Manajemen Talenta
	05.10	Pengelolaan <i>Asesment Centre</i>
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengelolaan <i>Asesment Centre</i>
	05.11	Pengelolaan Budaya Kerja Organisasi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengelolaan Budaya Kerja Organisasi
	05.12	Pakta Integritas
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pakta Integritas

	05.13	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan Pegawai
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan Pegawai
KP.06		Penghargaan dan Tanda Jasa
	06.01	Pemberian Tanda Jasa Satyalencana Karya Satya
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemberian Tanda Jasa Satyalencana Karya Satya
	06.02	Pemberian Penghargaan ASN Berprestasi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemberian Penghargaan ASN Berprestasi
KP.07		LHKPN dan LHKASN
	07.01	Pimpinan Tinggi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan LHKPN dan LHKASN Pimpinan Tinggi
	07.02	Pejabat Administrasi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan LHKPN dan LHKASN Pejabat Administrasi
	07.03	Pejabat Fungsional, Fungsional Umum dan PPPK
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan LHKPN dan LHKASN Pejabat Fungsional, Fungsional Umum dan PPPK
KP.08		Disiplin Pegawai
	08.01	Naskah-naskah yang berkaitan dengan disiplin pegawai Tingkat Ringan (Pernyataatnn Tidak Puas, Teguran Lisan, Teguran Tertulis)
	08.02	Naskah-naskah yang berkaitan dengan disiplin pegawai Tingkat Sedang (Penundaan KGB, KP dan Penurunan Gaji)
	08.03	Naskah-naskah yang berkaitan dengan disiplin pegawai Tingkat Berat (Penurunan Pangkat, Pembebasan Jabatan,Pemberhentian Dengan Hormat/Tidak Dengan Hormat)
KP.09		Pendelegasian Wewenang/Mandat
	09.01	Pelaksana Harian (PIH)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pelaksana Harian (PIH)
	09.02	Pelaksana Tugas (PIT)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pelaksana Tugas (PIT)
KP.10		Tata Usaha Kepegawaian/Administrasi Pegawai
	10.01	Data Pegawai, Sintem Informasi pegawai,

		KP4.
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Data Pegawai, Sintem Informasi pegawai, KP4.
10.02	Identitas Pegawai (Karpeg, Karsu, Karis, npwp)	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan Identitas Pegawai (Karpeg, Karsu, Karis, npwp)	
10.03	Izin Kepegawaian (Izin Belajar, Tugas Belajar Dalam Negeri dan Luar Negeri), Kursus	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan Izin Kepegawaian (Izin Belajar, Tugas Belajar Dalam Negeri dan Luar Negeri), Kursus	
10.04	Keanggotaan Pegawai Dalam Organisasi Sosial	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan Keanggotaan Pegawai Dalam Organisasi Sosial	
10.05	Daftar Hadir/Absensi Pegawai	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan Daftar Hadir/Absensi Pegawai	
10.06	Cuti	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan Cuti Tahunan, Cuti diluar Tanggungan Negara	
10.07	Kesehatan	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kesehatan	
10.08	Nominatif Pegawai	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan Nominatif Pegawai	
10.09	Pengurusan Tunjangan Kinerja	
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengurusan Tunjangan Kinerja	
	10.10	Pengurusan Uang Makan.
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengurusan Uang Makan.	
KP. 1 1		Kesejahteraan Pegawai
	11.01	Perumahan (TAPERUM, Biaya Uang Muka)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perumahan (TAPERUM, Biaya Uang Muka)
	11.02	Taspen, JHT, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Taspen, JHT, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian

	11.03	Bantuan sosial, asuransi pegawai, pakaian dinas, layanan antar jemput dan layanan kesenian dan olahraga
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Bantuan sosial, asuransi pegawai, pakaian dinas, layanan antar jemput dan layanan kesenian dan olahraga
	11.04	Pensiun Pegawai
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pensiun pegawai, Pembekalan Purnabakti, usulan pemberhentian, usulan penetapan pensiun (janda, duda, PNS yang tewas)
KP. 12		Berkas Perseorangan Pegawai
	12.01	Menteri, Wakil Menteri, Pimpinan Tinggi Madya
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas perseorangan pegawai / pejabat Menteri, Wakil Menteri, Pimpinan Tinggi Madya, Pegawai (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama kebawah) dan Pejabat lain, yang secara individual ditentukan instansi atau ASN yang berjasa terlibat peristiwa berskala nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
	12.02	Pegawai (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama kebawah)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas perseorangan Pegawai (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama kebawah)
	12.03	Pejabat lain, yang secara individual ditentukan instansi atau ASN yang berjasa terlibat peristiwa berskala nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas perseorangan Pejabat lain, yang secara individual ditentukan instansi atau ASN yang berjasa terlibat peristiwa berskala nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pejabat lain dan Pegawai yang secara individual ditentukan instansi atau ASN yang berjasa terlibat peristiwa berskala nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan
KP. 13		Organisasi Non Kedinasan
	13.01	KORPRI
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan KORPRI
	13.02	Dharma Wanita
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Dharma Wanita
	13.03	Koperasi

		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Koperasi
DL		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM
DL.01		Pendidikan
	01.01	Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Manajerial
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Manajerial
	01.02	Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional
	01.03	Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana
	01.04	Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Aparatur
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Aparatur
	01.05	Pendidikan dan Pelatihan Komunitas dan Masyarakat
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pendidikan dan Pelatihan Komunitas dan Masyarakat
	01.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan dan Pelatihan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan dan Pelatihan
KU		KEUANGAN
KU.01		Pelaksanaan Anggaran
	01.01	Pedoman, Petunjuk, dan Administrasi Pelaksanaan Anggaran
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pedoman, Petunjuk, dan Administrasi Pelaksanaan Anggaran seperti Langkah-langkah awal tahun, akhir tahun, capaian dan evaluasi pelaksanaan anggaran per triwulan, semester dan tahunan
	01.02	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) seperti Surat Pengesahan, Surat Usulan Revisi,Surat Persetujuan dan Pernyataan, Surat Pengantar usulan

		revisi
	01.03	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan dalam rangka PNBP, baik berupa penerimaan Non Pajak seperti Surat Usulan Target PNBP, Surat Perubahan Target, Surat Usulan Perubahan Jenis dan Tarif PNBP, Surat Laporan Realisasi PNBP, Surat Pengantar Ijin Penggunaan PNBP
KU.02		Tata Usaha Keuangan
	02.01	Pedoman dan Petunjuk Administrasi Keuangan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pedoman dan Petunjuk Pengelolaan Keuangan seperti Tata Cara Pengelolaan Hibah, Tata Cara Pengelolaan Rekening Pemerintah, Tata Cara Penetapan Pejabat Perbendaharaan, Fungsi dan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran, SOP Penyelesaian Kerugian Negara, SOP Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, SOP Revisi Kuasa Pengguna Anggaran, SOP Laporan Hibah, SOP Daftar Piutang Negara, SOP Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi Negara, SOP Pengajuan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan Nihil (SPM –GUP Nihil)/Tambahan Uang Persediaan Nihil (TUP Nihil), SOP Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, SOP Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan, SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat Kementerian, dll.
	02.02	Penatausahaan Hibah
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan hibah seperti hibah luar negeri dan dalam negeri, rekonsiliasi hibah, tindak lanjut hasil rekonsiliasi hibah, Pembinaan dan Monitoring hibah.
	02.03	Pejabat Perbendaharaan Negara
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan, seperti SK Pengangkatan KPA, PPK, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembinaan dan Monitoring Pejabat Perbendaharaan Negara

	02.04	Penyelesaian Kerugian Negara
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyelesaian Kerugian Negara berupa Tuntutan Ganti Rugi seperti Piutang Negara, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, rekonsiliasi Tuntutan Ganti Rugi, rekonsiliasi Tuntutan Perbendaharaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK/Itjen, Pembinaan dan Monitoring Penyelesaian Kerugian Negara.
	02.05	Penatausahaan Rekening Pemerintah
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan rekening pemerintah seperti Pembukaan dan penutupan rekening, restrukturisasi rekening, rekonsiliasi rekening, tindak lanjut hasil rekonsiliasi rekening.
KU 03		Perbendaharaan
	03.01	Dokumen Pertanggungjawaban Belanja
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pertanggungjawaban belanja di lingkungan Sekretariat Jenderal seperti Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar, Kuitansi, Pengeluaran Real, SPD.
	03.02	Buku Kas Umum dan Buku Pembantu
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pencatatan penerimaan dan pengeluaran permintaan belanja dari BPP di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia
	03.03	LPJ Bendahara Pengeluaran
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pertanggungjawaban belanja bendahara pengeluaran dan BPP di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia
	03.04	LPJ Bendahara Penerimaan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pertanggungjawaban pendapatan bendahara penerimaan.
	03.05	Penerimaan Negara Pajak
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penerimaan Negara Pajak
KU.04		Akuntansi dan Pelaporan
	04.01	Laporan Keuangan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaporan komponen Laporan Keuangan

		berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), dan Representasi Manajemen
	04.02	<p>Rekonsiliasi dan Data Laporan Keuangan</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Rekonsiliasi (pencocokan data) komponen Laporan Keuangan secara intra (dengan pihak internal) maupun extra (dengan pihak eksternal) berupa Berita Acara Rekonsiliasi, laporan kegiatan; serta naskah-naskah yang berkaitan dengan Analisa Data; Pembinaan, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan</p>
	04.03	<p>Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan Inspektorat Jenderal.</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan Inspektorat Jenderal, berupa <i>Action Plan</i>, surat, nota dinas, laporan kegiatan, dan dokumen pelaksanaan rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan.</p>
BM		PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
BM.01		Perencanaan Barang Milik Negara
	01.01	<p>Usulan Rencana Kebutuhan BMN</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Usulan Rencana Kebutuhan BMN</p>
	01.02	<p>Rencana Kebutuhan BMN Kementerian</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Rencana Kebutuhan BMN Kementerian</p>
	01.03	<p>Hasil Analisis Kebutuhan BMN</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Hasil Analisis Kebutuhan BMN</p>
	01.04	<p>Rencana Kebutuhan Aset Berwujud</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Rencana Kebutuhan Aset Berwujud</p>
	01.05	<p>Rencana Kebutuhan Aset tak Berwujud</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Rencana Kebutuhan Aset tak Berwujud</p>
BM.02		Pengadaan Barang Milik Negara (Layanan Pengadaan)
	02.01	<p>Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa</p>

		a. Pengadaan Barang Persediaan (habis pakai)
		b. Pengadaan Barang Bukan Persediaan
		c. Pengadaan Jasa Lainnya
		d. Pengadaan Jasa Konsultasi
		e. Pengadaan Teknis Aset Tetap (Tanah)
		f. Pengadaan Aset Tidak Berwujud (<i>Software</i>)
		g. Pengadaan Sewa
		h. Pengadaan Modal Peralatan dan Mesin
		i. Pekerjaan Konstruksi (Bangunan)
	02.02	Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dan data informasi pengadaan barang/jasa
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dan data informasi pengadaan barang/jasa
	02.03	Pembinaan, Bimbingan, Pendampingan, dan Konsultasi Teknis Pengadaan Barang/Jasa
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pembinaan, Bimbingan, Pendampingan, dan Konsultasi Teknis Pengadaan Barang/Jasa
	02.04	Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan
	02.05	Laporan Pengadaan Barang/Jasa
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Pengadaan Barang/Jasa
	02.06	Telaahan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Telaahan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa
	02.07	Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
		- Sekretariat Pusat UKPBJ
		- Sekretariat Perwakilan UKPBJ Unit Eselon I
		- Sekretariat Perwakilan UKPBJ Kantor Wilayah
	02.08	Pendistribusian Barang Milik Negara

		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pendistribusian Barang Milik Negara
BM 03		Penetapan Status dan Pengamanan Barang Milik Negara (BMN)
	03.01	Penggunaan Barang Milik Negara (BMN)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penggunaan Barang Milik Negara (BMN)
		a. Berkas Permohonan Status Penggunaan Barang Milik Negara atau Status Penggunaan Barang Milik Negara untuk dioperasikan oleh Pihak Lain
		b. SK Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara atau Status Penggunaan Barang Milik Negara untuk dioperasikan oleh Pihak Lain
		c. Berkas Penggunaan Sementara Barang Milik Negara (permohonan, SK dan tindak lanjut)
		d. Berkas Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Negara (permohonan, SK dan tindak lanjut)
		e. Berkas Pengalihan Penggunaan Barang Milik Negara (permohonan, SK dan tindak lanjut)
		f. Berkas Alih Fungsi Barang Milik Negara (permohonan, SK dan tindak lanjut)
	03.02	Pemanfaatan Barang Milik Negara
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemanfaatan Barang Milik Negara
		Berkas permohonan, SK dan tindak lanjut Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangunan Guna Serah (BGS), Bangunan Serah Guna (BSG), dan Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur (KSPI)
	03.03	Pengamanan dan Pemeliharaan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara
		a. Dokumen Permasalahan Barang Milik Negara
		b. Berkas Pengamanan dan Pemeliharaan (SK Tim dan Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah)
		c. Laporan Data Tanah
	03.04	Rumah Negara
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Rumah Negara

		a. Berkas Permohonan Penetapan Status Penggolongan Rumah Negara
		b. SK Penetapan Status Penggolongan Rumah Negara
		c. Surat Pembatalan Ijin Penghunian Rumah Negara
		d. Surat Ijin Penghunian Rumah Negara
BM.04		Penatausahaan Barang Milik Negara
	04.01	Pencatataan Barang Milik Negara
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pencatataan Barang Milik Negara
	04.02	Inventarisasi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Inventarisasi
	04.03	Opname fisik
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Opname fisik
	04.04	Rekonsiliasi data Barang Milik Negara
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Rekonsiliasi data Barang Milik Negara
	04.05	Pengawasan dan Pengendalian BMN
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengawasan dan Pengendalian BMN
	04.06	Laporan Barang Milik Negara
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Barang Milik Negara
BM.05		Pemindahtanganan dan Penghapusan
	05.01	Penjualan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penjualan
	05.02	Tukar Menukar
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Tukar Menukar
	05.03	Hibah
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Hibah
	05.04	Pemusnahan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemusnahan
	05.05	Penghapusan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penghapusan
HM		KEHUMASAN
HM.01		Informasi dan Komunikasi
	01.01	Media Massa (Cetak, Elektronik, Media Sosial)

		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Media Massa (Cetak, Elektronik, Media Sosial)
	01.02	Sosialisasi dan Diseminasi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Sosialisasi dan Diseminasi
	01.03	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
	01.04	Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas)
	01.05	Peliputan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Peliputan
	01.06	Konferensi Pers
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Konferensi Pers
	01.07	Siaran Pers
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Siaran Pers
HM.02		Dokumentasi
	02.01	Produk Informasi (Media Cetak, Elektronik, Media Sosial)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Produk Informasi (Media Cetak, Elektronik, Media Sosial)
		- Film, Foto
		- Video Grafis
		- Narasi Tunggal Media Massa Elektronik
		- Info Grafis (Poster, Banner)
		- Surat Penyerahan (Bingkai Foto, dll)
		- Konten Video Revolusi Media Digital
	- Konten Media Sosial (Youtube, Twitter, IG)	
	02.02	Rekapitulasi Pemberitaan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Rekapitulasi Pemberitaan		
PP		PERPUSTAKAAN
PP.01		Akusisi
	01.01	Pembelian
		Naskah yang berkaitan dengan

		pelaksanaan pembelian/pengadaan bahan pustaka mulai dari seleksi, proses pengadaan, hingga penyerahan hasil pengadaan ke bagian pengolahan bahan pustaka.
	01.02	Hadiah
		Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian hadiah bahan pustaka mulai dari seleksi, proses hadiah, hingga penyerahan hasil hadiah ke bagian pengolahan bahan pustaka.
	01.03	Hibah
		Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian hibah bahan pustaka mulai dari seleksi, proses hibah, hingga penyerahan hasil hibah ke bagian pengolahan bahan pustaka.
	01.04	Tukar Menukar
		Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan tukar menukar bahan pustaka mulai dari seleksi, proses tukar menukar, hingga penyerahan hasil tukar menukar bahan Pustaka ke bagian pengolahan bahan pustaka.
	01.05	Pendistribusian Bahan Pustaka Surplus
		Naskah yang berkaitan dengan pendistribusian bahan pustaka surplus mulai dari seleksi, proses pendistribusian, hingga penyerahan bahan pustaka surplus ke pihak penerima.
	01.06	Inventarisasi Bahan Pustaka (Buku Induk)
		Naskah yang berkaitan dengan pencatatan penerimaan bahan pustaka dalam buku induk
	PP.02	Koleksi Bahan Pustaka
	02.01	Pengolahan Bahan Pustaka
		Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengolahan yang meliputi pelaksanaan katalogisasi, klasifikasi, pasca katalogisasi, verifikasi bahan pustaka, pemasukan data ke pangkalan data, penyusunan, pengendalian dan pengembangan tajuk nama pengarang, badan korporasi dan subjek, serta penyiapan akses layanan informasi ke pemustaka.
		- Klasifikasi dan Tajuk Subyek
		- Katalogisasi

		- Abstrak Bahan Pustaka
	02.02	Pangkalan Data Koleksi
		Naskah yang berkaitan dengan data koleksi perpustakaan
PP.03		Layanan Perpustakaan
	03.01	Keanggotaan
		Naskah yang berkaitan dengan data keanggotaan perpustakaan.
	03.02	Sirkulasi
		Naskah yang berkaitan dengan kegiatan peminjaman, pengembalian, statistik, dan laporan bahan pustaka.
	03.03	Referensi
		Naskah yang berkaitan dengan layanan koleksi referensi.
	03.04	Alih Bahasa
		Naskah yang berkaitan dengan kegiatan alih bahasa.
	03.05	Pengembangan TI Perpustakaan
		Naskah yang berkaitan dengan pengembangan <i>website</i> perpustakaan, kemas ulang informasi dalam format multimedia, pengembangan aplikasi perpustakaan, dan pengembangan pangkalan data digital
	03.06	Penyiangan Bahan Pustaka
		Naskah yang berkaitan dengan Penyiangan Bahan Pustaka
PP.04		Preservasi Bahan Pustaka
	04.01	Perawatan Bahan Pustaka
		Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan teknis konservasi dalam perawatan dan pengawetan bahan pustaka.
	04.02	Perbaikan Bahan Pustaka
		Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan teknis konservasi dalam perbaikan bahan pustaka.
	04.03	Penjilidan
		Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan teknis konservasi dalam penjilidan bahan pustaka.
	04.04	Reproduksi Foto
		Naskah yang berkaitan dengan kegiatan reproduksi foto ke dalam bentuk digital serta pemeliharaan dan penyimpanannya.

PP.05		Pengembangan Perpustakaan
	05.01	Standar Nasional Perpustakaan
		Naskah yang berkaitan dengan penyusunan standar nasional perpustakaan khusus.
	05.02	Pedoman Perpustakaan
		Naskah yang berkaitan dengan penyusunan pedoman perpustakaan khusus.
	05.03	Akreditasi Perpustakaan
		Naskah yang berkaitan dengan kelengkapan permintaan atau pemberian akreditasi perpustakaan.
	05.04	Pengkajian Perpustakaan
		Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian perpustakaan, mulai dari rapat persiapan, studi referensi, penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data/survei, analisis data, pembahasan hasil survei, penyusunan draft awal, ekspose, penyusunan draft akhir, hingga pencetakan hasil kajian.
	05.05	Promosi Perpustakaan (publikasi, pameran, dsb)
		Naskah yang berkaitan dengan promosi perpustakaan.
PP.06		Tenaga Perpustakaan
	06.01	Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan
		Naskah yang berkaitan dengan analisa/ perencanaan kebutuhan penyelenggaraan diklat serta kerja sama dengan instansi lain.
	06.02	Sertifikasi Tenaga Perpustakaan
		Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi kompetensi pustakawan.
	06.03	Pembinaan Tenaga Perpustakaan
		Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis tenaga perpustakaan, bimbingan teknis tim penilai pustakawan, dan pengembangan profesi pustakawan (seminar, <i>workshop</i> , dsb).
	06.04	Penilaian Jabatan Fungsional Pustakawan
		Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penilaian pustakawan.
KS		KERJA SAMA

KS.01		Kerja Sama Dalam Negeri
	01.01	Lembaga Tinggi Negara/Pemerintah Pusat
		Naskah/dokumen yang substansinya berkaitan proses penyusunan suatu perjanjian kerja sama, mulai dari peninjauan,perundingan, perumusan dengan Lembaga Tinggi Negara,
	01.02	Pemerintah Daerah (Provinsi, Kab/Kota)
		Naskah/dokumen yang substansinya berkaitan proses penyusunan suatu perjanjian kerja sama, mulai dari peninjauan, perundingan, perumusan,dengan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kab/Kota)
	01.03	Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swasta dalam negeri
		Naskah/dokumen yang substansinya berkaitan proses penyusunan suatu perjanjian kerja sama, mulai dari peninjauan, perundingan, perumusan, dengan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swasta dalam negeri
	01.04	Lembaga Pendidikan
		Naskah/dokumen yang substansinya berkaitan proses penyusunan suatu perjanjian kerja sama, mulai dari peninjauan, perundingan, perumusan, dengan Lembaga Pendidikan
	01.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kerja Sama dalam negeri
		Naskah/dokumen yang substansinya berkaitan dengan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kerja Sama dalam negeri
KS.02		Kerja Sama Luar Negeri
	02.01	Badan Khusus Perserikatan Bangsa Bangsa
		Naskah/dokumen yang substansinya berkaitan proses penyusunan suatu perjanjian kerja sama, mulai dari peninjauan, perundingan, perumusan, dengan Badan Khusus Perserikatan Bangsa Bangsa
	02.02	Organisasi Internasional selain Badan Khusus Perserikatan Bangsa Bangsa
		Naskah/dokumen yang substansinya berkaitan proses penyusunan suatu perjanjian kerja sama, mulai dari peninjauan, perundingan, perumusan, dengan Organisasi Internasional selain Badan Khusus Perserikatan Bangsa Bangsa

	02.03	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kerja Sama luar negeri
		Naskah/dokumen yang substansinya berkaitan dengan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kerja Sama luar negeri
HK		HUKUM
HK.01		Legislasi Nasional
	01.01	Program Legislasi Nasional
		Naskah yang berkaitan dengan Program Legislasi Nasional
HK.02		Rancangan Peraturan Perundang-undangan
	02.01	Produk Hukum yang Bersifat Pengaturan
		Naskah yang berkaitan dengan Produk Hukum yang Bersifat Pengaturan
	02.02	Produk Hukum yang Bersifat Penetapan
		Naskah yang berkaitan dengan Produk Hukum yang Bersifat Penetapan
HK.03		Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum
		Naskah yang berkaitan dengan Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum
HK.04		Kasus/Sengketa Hukum/Arbitrase
	04.01	Perkara Pidana
		Naskah yang berkaitan dengan Perkara Pidana
	04.02	Perkara Perdata
		Naskah yang berkaitan dengan Perkara Perdata
	04.03	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara
		Naskah yang berkaitan dengan Perkara Peradilan Tata Usaha Negara
	04.04	Non Litigasi
		Naskah yang berkaitan dengan Non Litigasi
HK.05		Layanan Advokasi Hukum
	05.01	Advokasi Hukum Litigasi
		Naskah-naskah terkait administrasi persidangan (Surat Dinas, Nota Dinas) serta dokumen/naskah yang dibuat dalam rangka proses beracara (Relaas Panggilan, Gugatan, Eksepsi dan Jawaban, Replik, Duplik, Daftar Bukti, Kesimpulan, dll)
	05.02	Advokasi Hukum Non Litigasi

		Naskah/Dokumen yang memuat tentang administrasi perkara-perkara non Litigasi (Surat Dinas, Nota Dinas)
	05.03	Pengaduan Hukum
	05.04	Naskah/Dokumen yang memuat tentang tanggapan/respon terhadap Pengaduan Hukum (Nota Dinas, Surat Dinas)
		Bantuan Hukum
	05.05	Naskah/Dokumen yang memuat tentang surat jawaban terhadap permohonan bantuan hukum yang diajukan (Nota Dinas, Surat Dinas)
		Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)
	05.06	Naskah/Dokumen yang memuat tentang Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) (Nota Dinas, Surat Dinas)
		Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)
Naskah/ Dokumen yang memuat tentang Sistem Informasi Pelayanan Publik (Nota Dinas, Surat Dinas)		
HK.06		Dokumentasi Produk Hukum
		Naskah/ Dokumen yang memuat tentang Dokumentasi Produk Hukum
AR		KEARSIPAN
AR.01		Penciptaan
	01.01	Pengurusan Surat Masuk
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi surat masuk
	01.02	Pengurusan Surat Keluar
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi surat keluar
AR.02		Penggunaan dan Pemeliharaan Arsip
	02.01	Peminjaman Arsip
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan peminjaman arsip aktif di Sentral Arsip Aktif atau arsip inaktif di Sentral Arsip Inaktif.
	02.02	Pemberkasan Arsip
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberkasan meliputi daftar arsip aktif (berkas dan isi berkas).
	02.03	Penataan Arsip Inaktif
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penataan arsip inaktif meliputi pengaturan fisik, pengolahan informasi arsip, dan penyusunan daftar arsip

		inaktif.
	02.04	Penyimpanan Arsip
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyimpanan dan pengamanan arsip serta pengamanan.
	02.05	Pemeliharaan dan Perawatan Arsip Inaktif
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan dan perawatan arsip inaktif di unit kearsipan, diantaranya pemeriksaan kebersihan ruangan, pemberitahuan kepada unit pengolah, dan lain-lain.
	02.06	Alih Media
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan alih media meliputi kebijakan, autentikasi, berita acara, daftar arsip yang dilakukan alih media.
	02.07	Pengelolaan Arsip Terjaga
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengelolaan Arsip Terjaga.
	02.08	Pengelolaan Arsip Vital
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengelolaan Arsip Vital.
AR.03		
	Penyusutan Arsip	
	03.01	Pemindahan Arsip Inaktif
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemindahan arsip inaktif dari unit kerja ke unit kearsipan. Meliputi Berita acara pemindahan dan Daftar arsip yang dipindahkan
	03.02	Pemusnahan Arsip
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemusnahan arsip meliputi Panitia penilai, Rekomendasi/ pertimbangan/ Persetujuan pemusnahan arsip, Penetapan arsip yang akan dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar arsip yang dimusnahkan
	03.03	Penyerahan Arsip Statis
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyerahan arsip statis meliputi Pembentukan panitia, Penilaian panitia penilai, permintaan persetujuan, Surat Persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan dari pencipta arsip, Keputusan penetapan penyerahan, berita acara penyerahan

		arsip, daftar arsip yang diserahkan
AR.04		Pembinaan Kearsipan
	04.01	Sosialisasi/Bimbingan Konsultasi/Fasilitasi/ Bimbingan Teknis
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Sosialisasi/Bimbingan Konsultasi/Fasilitasi/ Bimbingan Teknis
	04.02	Pengawasan Kearsipan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengawasan Kearsipan
AR.05		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kearsipan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kearsipan
TU		KETATAUSAHAAN
TU.01		Ketatausahaan
	01.01	Persuratan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan/pengelolaan surat masuk dan surat keluar, seperti kegiatan penomoran surat, pengarahannya, pencatatan, dan pendistribusian surat, penggunaan cap/stempel dan pengiriman surat/barang cetakan.
	01.02	Notulen Rapat/Risalah
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan risalah/notulen rapat, seperti Rapat Pimpinan dan Rapat Staf
	01.03	Ucapan Terima Kasih/Ucapan Selamat
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian ucapan Terima Kasih/Ucapan selamat.
RT		RUMAH TANGGA
RT.01		Kerumahtanggaan
	01.01	Penggunaan Ruang dan Peralatan Kantor
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan peminjaman dan penggunaan ruang dan peralatan kantor
	01.02	Jalan dan Lingkungan Kantor
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan jalan dan lingkungan kantor termasuk taman meliputi dari permintaan/usulan sampai dengan pelaporan hasil pekerjaan.
	01.03	Penggunaan dan Penghunian Rumah Negara

		Naskah-naskah yang berkaitan dengan peminjaman, penggunaan, dan penghunian rumah negara
	01.04	Penggunaan Kendaraan Dinas
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan peminjaman dan penggunaan kendaraan dinas
	01.05	Penggunaan Barang Elektronik, Telekomunikasi, mesin, jaringan listrik, air, telepon dan internet
Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi Penggunaan barang elektronik, mesin, jaringan listrik, air, telepon, faksimile, TV Kabel, internet dan cloud		
RT.02		Pemeliharaan Fasilitas Kantor
	02.01	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta Area Kantor
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemeliharaan gedung dan bangunan serta area kantor
	02.02	Pemeliharaan Kendaraan Dinas
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemeliharaan Kendaraan Dinas
	02.03	Pemeliharaan Barang Elektronik dan mesin, jaringan listrik, saluran air, telepon dan internet
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemeliharaan Barang Elektronik dan mesin, jaringan listrik, saluran air, telepon dan internet
	02.04	Pemeliharaan Alat Kesehatan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemeliharaan alat kesehatan
RT.03		Perjalanan Dinas
	03.01	Perjalanan Dinas (Dalam Negeri)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan perjalanan Dinas dalam negeri
	03.02	Perjalanan Dinas (Luar Negeri)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan perjalanan Dinas luar negeri
	03.03	Evaluasi dan Pelaporan Perjalanan Dinas (Dalam/Luar Negeri)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan, Evaluasi dan Pelaporan Perjalanan Dinas (Dalam Negeri/Luar Negeri)
RT.04		Pembinaan Sikap Mental dan Layanan Kesehatan
	04.01	Layanan Keagamaan dan Sosial
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan permintaan rohaniawan, undangan kegiatan ceramah keagamaan,

		permohonan narasumber ceramah keagamaan, himbauan Zakat, himbauan Qurban, undangan Shalat Idul Fitri dan Idul Adha serta kegiatan keagamaan lainnya.
	04.02	Layanan Kesehatan Jasmani
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kesehatan jasmani seperti pelaksanaan senam pagi, permintaan instruktur senam pagi, SK Intrukstur Senam.
	04.03	Pelayanan Kesehatan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan medis poli gigi, poli umum, dan poli mata.
PT		Keprotokolan
PT 01		Keprotokolan
	01.01	Penyelenggaraan Upacara dan Perayaan Hari Besar
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan kegiatan Upacara Nasional
	01.02	Perayaan Hari Besar Nasional
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perayaan Hari Besar Nasional
	01.03	Pelayanan Tamu, Acara Kedinasan, Jamuan, dan Ramah Tamah
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan tamu, acara kedinasan, jamuan, dan ramah tamah
	01.04	Daftar Nama Pejabat dan Alamat
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyampaian informasi terkait dengan daftar nama pejabat dan alamat
	01.05	Buku Tamu
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan buku tamu
	01.06	Agenda Pimpinan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, penjadualan dan pelaksanaan agenda pimpinan, pidato pimpinan, dan lain sebagainya.
PT 02		Pengamanan
	02.01	Pengamanan Personil (VVIP/VIP)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengamanan personil VVIP/VIP
	02.02	Pengamanan Lingkungan, Fisik dan Instalasi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengamanan lingkungan, fisik, dan

		instalasi
	02.03	Laporan Keamanan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan pengamanan di lingkungan unit kerja
	02.04	Laporan Kejadian
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan kejadian di lingkungan unit kerja
	02.05	Bantuan Pengamanan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan permintaan dan bantuan pengamanan
PW		PENGAWASAN
PW.01		Perencanaan
	01.01	Kebijakan Pengawasan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kebijakan Pengawasan
	01.02	Perjanjian Kinerja
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perjanjian Kinerja
	01.03	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
	01.04	Program Kerja Administrasi Umum (PKAU)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Program Kerja Administrasi Umum (PKAU)
	01.05	Rapat Koordinasi Pengawasan (RAKORWAS)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Program Kerja Administrasi Umum (PKAU)
	01.06	Ikhtisar Hasil Pengawasan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Ikhtisar Hasil Pengawasan
PW.02		Pelaksanaan Pengawasan
	02.01	Audit Kinerja & Informasi, Reviu dan Evaluasi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Audit Kinerja & Informasi, Reviu dan Evaluasi
	02.02	Audit Tujuan Tertentu/Khusus
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Audit Tujuan Tertentu/Khusus

	02.03	Pemantauan/Monitoring
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemantauan/Monitoring
		BPK RI, BPKP RI, ORI, Inspektur Jenderal
	02.04	Pengawasan lainnya, Pendampingan, Sosialisasi, PKS dll
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengawasan lainnya, Pendampingan, Sosialisasi, PKS dll		
PW.03		Pelaporan
	03.01	Laporan Hasil Audit Kinerja (LHA/LHP), Informasi Data Pendukung Pemeriksaan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Hasil Audit Kinerja (LHA/LHP), Informasi Data Pendukung Pemeriksaan
	03.02	Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu (Audit Khusus)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu (Audit Khusus)
	03.03	Pemantauan/Monitoring BPK, BPKP, Ombudsman, Itjen
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemantauan/Monitoring BPK, BPKP, Ombudsman, Itjen
PW.04		Tindak Lanjut
	04.01	Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja
	04.02	Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit Khusus
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit Khusus
	04.03	Tindak Lanjut (BPKP RI), BPK RI, ITJEN
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Tindak Lanjut (BPKP RI), BPK RI, ITJEN
PW.05		Reviu dan Tindak Lanjut Reviu
	05.01	Reviu
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Reviu
	05.02	Tindak Lanjut Reviu
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Tindak Lanjut Reviu
PW.06		Tindak Lanjut Pengaduan
	06.01	Whistle Blowing System (WBS)

		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Tindak Lanjut Pengaduan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS)
	06.02	Gratifikasi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Tindak Lanjut Pengaduan Gratifikasi
	06.03	Pengaduan Tertulis (SMS <i>Gateway</i> , <i>Po Box Email Itjen</i>)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Tindak Lanjut Pengaduan Tertulis (SMS <i>Gateway</i> , <i>Po Box Email Itjen</i>)
	06.05	Pengaduan melalui aplikasi LAPOR (Layanan Pengaduan Secara <i>Online</i> Rakyat)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Tindak Lanjut Pengaduan melalui aplikasi LAPOR (Layanan Pengaduan Secara <i>Online</i> Rakyat)
	06.06	Pengaduan Ombusman
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Tindak Lanjut Pengaduan Ombusman
PW.07		Tindak Lanjut Atensi dan Telaahan
	07.01	Tanggapan/Telaahan Hukuman Disiplin yang Tidak Ditindaklanjuti
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Tanggapan/Telaahan Hukuman Disiplin yang Tidak Ditindaklanjuti
	07.02	Tanggapan/Telaahan Hukuman Disiplin yang Ditindaklanjuti
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Tanggapan/Telaahan Hukuman Disiplin yang Ditindaklanjuti
	07.03	Daftar nama pegawai Kementerian Hak Asasi Manusia yang dikenakan sanksi hukuman disiplin/kartu cela
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Daftar nama pegawai Kementerian Hak Asasi Manusia yang dikenakan sanksi hukuman disiplin/kartu cela
TI		TEKNOLOGI DAN INFORMASI
TI.01		Pengamanan Data
	01.01	Kuesioner, Data Pendukung, Analisis
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kuesioner, Data Pendukung, Analisis
TI 02		Pengamanan Jaringan
	02.01	Pemeliharaan Jaringan, Audit Jaringan, Laporan Hasil Audit
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemeliharaan Jaringan, Audit Jaringan, Laporan Hasil Audit

TI 03		Standarisasi
	03.01	Standarisasi Teknologi dan Informasi
		Penyusunan Regulasi Standarisasi Teknologi dan Informasi yang berkaitan dengan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri dan Standar Operasional Prosedur
	03.02	Implementasi Aplikasi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat Perencanaan Komite TIK, Aplikasi Sada, Digital Signature, Sertifikat Elektronik
	03.03	Implementasi Situs Internet, Portal Internet dan Surat Elektronik
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pelaksanaan Implementasi Situs internet, Portal Internet dan Surat Elektronik
	03.04	Uji Coba Infrastruktur
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Uji Coba Infrastruktur
TI 04		Perencanaan Pengembangan Teknologi Informasi
	04.01	Penyusunan Program Perencanaan Teknologi dan Informasi
		Perencanaan <i>server</i> , Perencanaan jaringan
	04.02	Pengembangan Infrastruktur Teknologi dan Informasi
		Pengembangan <i>Data Center</i> Kementerian Hak Asasi Manusia, Pengembangan <i>Server</i>
	04.03	Pengembangan Aplikasi
		Pengembangan Simpeg, Pengembangan <i>Website</i>
	04.04	Pengembangan Database, Situs Internet, dan Surat Elektronik
		Naskah-Naskah yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pengembangan Database, situs internet, dan surat elektronik
TI 05		Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi
	05.01	Pengelolaan Jaringan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengelolaan Jaringan
	05.02	Pengelolaan Jaringan Sistem Informasi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengelolaan Jaringan Sistem Informasi
	05.03	Pengelolaan Database
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengelolaan Database

	05.04	Pengelolaan Situs Internet, Portal Internet, dan Surel
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengelolaan Situs Internet, Portal Internet, dan Surel
	05.05	Pengelolaan Aplikasi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengelolaan Aplikasi
	05.06	Pengelolaan Alat Pendukung
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengelolaan Alat Pendukung
TI 06		Layanan Sistem Teknologi dan Informasi
	06.01	Layanan Keluhan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan keluhan LPSE
	06.02	Tindak Lanjut Keluhan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Tindak Lanjut Keluhan
	06.03	Monitoring/Pemantauan Layanan Keluhan
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Monitoring/Pemantauan Layanan Keluhan meliputi Komputer rusak, Printer rusak, Wifi tidak aktif
	06.04	Evaluasi
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Hasil evaluasi TI

MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NATALIUS PIGAI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG KLASIFIKASI ARSIP
KEMENTERIAN HAK ASASI
MANUSIA

KLASIFIKASI ARSIP SUBSTANTIF

KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP		JENIS ARSIP
IP		INSTRUMEN DAN PENGUATAN HAM
IP.01		Penyusunan dan Evaluasi Instrumen HAM
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyusunan dan Evaluasi Instrumen Hak Asasi Manusia dari keseluruhan proses penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyiapan, analisis, dan evaluasi instrumen hak asasi manusia, serta pelaporan di bidang pelaporan penerapan instrumen internasional hak asasi manusia.
	01.01	Analisis Peraturan Perundang-undangan Berperspektif Hak Asasi Manusia Bidang Hukum, Politik, dan Pertahanan Keamanan Negara
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Analisis Peraturan Perundang-undangan Berperspektif Hak Asasi Manusia Bidang Hukum, Politik, dan Pertahanan Keamanan Negara
	01.02	Analisis Peraturan Perundang-undangan Berperspektif Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Analisis Peraturan Perundang-undangan Berperspektif Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya
	01.03	Penyiapan dan Evaluasi Instrumen Hak Asasi Manusia Bidang Hukum, Politik, dan Pertahanan Keamanan Negara
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyiapan dan Evaluasi Instrumen Hak Asasi Manusia Bidang Hukum, Politik, dan Pertahanan Keamanan Negara
	01.04	Penyiapan dan Evaluasi Instrumen Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyiapan dan Evaluasi Instrumen Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya

	01.05	Pemantauan dan Pelaporan Implementasi Instrumen HAM Bidang Hukum, Politik, dan Pertahanan Keamanan Negara
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemantauan dan Pelaporan Implementasi Instrumen HAM Bidang Hukum, Politik, dan Pertahanan Keamanan Negara
	01.06	Pemantauan dan Pelaporan Implementasi Instrumen HAM Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemantauan dan Pelaporan Implementasi Instrumen HAM Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya
IP. 02		Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Aparatur Negara
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan dan pelaksanaan strategi pemberian penguatan, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan kapasitas hak asasi manusia aparatur kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemerintah desa
	02.01	Penyiapan Sistem dan Strategi Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Aparatur Negara
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyiapan Sistem dan Strategi Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Aparatur Negara
	02.02	Pelaksanaan Strategi Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Aparatur Negara
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pelaksanaan Strategi Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Aparatur Negara
	02.03	Pemantauan Evaluasi, dan Pelaporan Sistem dan Strategi Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Aparatur Negara
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemantauan Evaluasi, dan Pelaporan Sistem dan Strategi Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Aparatur Negara
IP. 03		Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Masyarakat, Komunitas dan Pelaku Usaha
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan dan pelaksanaan strategi pemberian penguatan, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan kapasitas hak asasi manusia Masyarakat, Komunitas dan Pelaku Usaha
	03.01	Penyiapan Sistem dan Strategi Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Masyarakat, Komunitas dan Pelaku Usaha
	03.02	Pelaksanaan Strategi Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Masyarakat, Komunitas dan Pelaku Usaha

	03.03	Pemantauan Evaluasi, dan Pelaporan Sistem dan Strategi Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Masyarakat, Komunitas dan Pelaku Usaha
KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP		JENIS ARSIP
HA		PELAYANAN DAN KEPATUHAN HAK ASASI MANUSIA
HA. 01		Pelayanan Hak Asasi Manusia
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pelayanan Hak Asasi Manusia dari keseluruhan proses penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan pengaduan dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan pemenuhan hak asasi manusia sesuai dengan kebijakan teknis.
	01.01	Penerimaan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia
		Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan ringkasan singkat permasalahan dugaan pelanggaran HAM dengan memuat data dan informasi.
	01.02	Telaahan/Analisis Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia
		Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan ringkasan singkat dugaan pelanggaran HAM dengan memuat data dan informasi, dasar hukum dan peraturan perundang-undangan terkait analisis, serta kesimpulan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran HAM
	01.03	Klarifikasi/Koordinasi/Konsultasi
		Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan permohonan klarifikasi, koordinasi dan konsultasi untuk meminta/mencari data dan informasi tentang dugaan pelanggara HAM serta upaya yang telah dan akan dilaksanakan oleh instansi terkait untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM dimaksud
	01.04	Informasi/Pemberitahuan/Ucapan Terima Kasih
		Naskah dinas yang berkaitan dengan informasi/ pemberitahuan atas tindak lanjut klarifikasi/koordinasi/ konsultasi kepada pengadu serta ucapan terima kasih kepada instansi terkait yang telah menindaklanjuti saran dan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia
	01.05	Rekomendasi
		Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan kesimpulan dan upaya penyelesaian atas hasil pemeriksaan pelanggaran HAM yang

		disampaikan kepada Pihak Terkait yang wajib dilaksanakan dan ditindaklanjuti dalam rangka penyelesaian pelanggaran HAM
	01.06	HAM Aktual/Penanganan Pemulihan Korban Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Secara Nonyudisial
		Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran HAM yang mendapat perhatian nasional dan internasional
	01.07	Pemenuhan Hak Para Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia
		Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak Para Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia
	01.08	Pelaksanaan Advokasi Hak Asasi Manusia
		Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan Pelaksanaan Advokasi Hak Asasi Manusia
	01.09	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelayanan Hak Asasi Manusia
		Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelayanan Hak Asasi Manusia
HA.02		Kepatuhan Hak Asasi Manusia Instansi Pemerintah
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pelayanan Hak Asasi Manusia dari keseluruhan proses penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kepatuhan hak asasi manusia bagi Instansi Pemerintah.
	02.01	Penyiapan Penyelenggaraan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Instansi Pemerintah
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyiapan Penyelenggaraan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Instansi Pemerintah
	02.02	Koordinasi/Konsultasi Pengelolaan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Instansi Pemerintah
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Koordinasi/ Konsultasi Pengelolaan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Instansi Pemerintah
	02.03	Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Instansi Pemerintah
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Instansi Pemerintah
HA.03		Kepatuhan Hak Asasi Manusia Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pelayanan Hak Asasi Manusia dari keseluruhan proses penyiapan perumusan dan

		pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kepatuhan Hak Asasi Manusia Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha
	03.01	Penyiapan Penyelenggaraan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyiapan Penyelenggaraan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha
	03.02	Koordinasi/Konsultasi Pengelolaan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Koordinasi/ Konsultasi Pengelolaan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha
	03.03	Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha

MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NATALIUS PIGAI